

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hubungan Internasional merupakan hubungan antar negara, antar individu, Serta aktor-aktor yang berperan dalam aktivitas global. setiap negara pasti melakukan hubungan negara karena sama hal nya seperti manusia yang tidak bisa hidup sendiri, suatu negara pasti melakukan kontak dengan negara lain untuk keberjalanan negara tersebut. Menurut JC. Johari (1987), Hubungan internasional merupakan sebuah studi mengenai interaksi yang terjadi antar negara-negara yang berdaulat, selain itu hubungan internasional juga berkaitan dengan interaksi aktor-aktor non negara yang memiliki pengaruh terhadap kondisi politik antar negara dan juga global. Seiring berjalannya waktu, studi hubungan internasional terus berkembang karena bersamaan dengan perubahan dalam sistem internasional. Pada masa perang dingin, studi internasional hanya berfokus pada isu politik dan keamanan. Namun, pasca perang dingin, fokus studi ini berkembang menjadi ekonomi, HAM, lingkungan, dan terorisme (JC. Johari, 1987)

Transisi energi adalah usaha untuk mengganti sumber energi yang berasal dari fosil dan tidak ramah lingkungan menjadi energi yang bersih dan tidak merusak lingkungan. Transisi energi menjadi salah satu fokus komunitas internasional dalam beberapa dekade terakhir. Para ilmuwan, organisasi hingga pemerintah negara mulai menekankan untuk melakukan transisi energi, terlebih lagi karena efek berkurangnya cadangan minyak dunia dan melonjaknya harga

minyak hingga mencapai level tertinggi di pasar internasional yang diakibatkan oleh perang Rusia-Ukraina (Kolaczkowski, 2022). Hal ini menjadikan pentingnya transisi energi itu dilakukan.

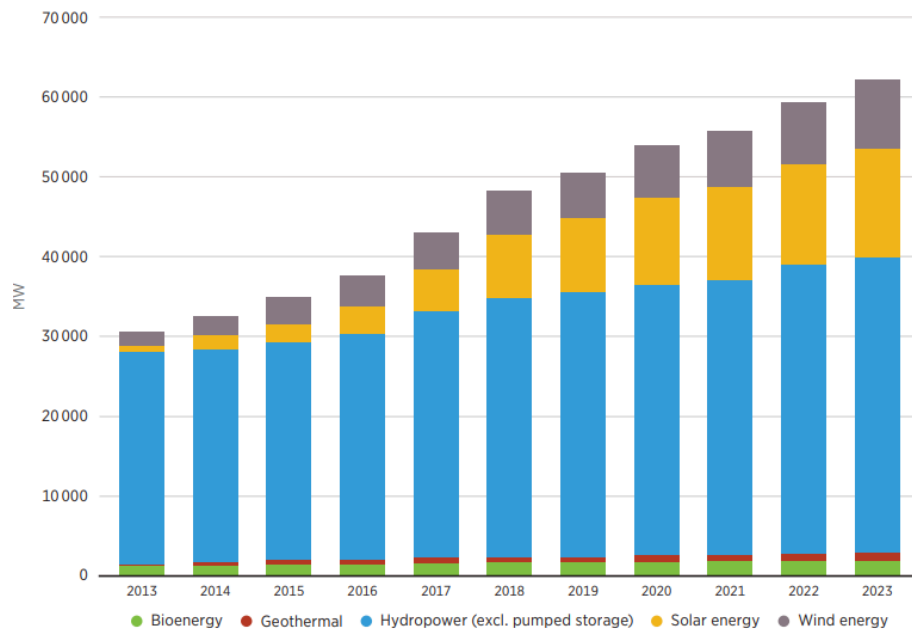
Banyak negara-negara miskin dan berkembang khususnya di benua Afrika yang masih belum mempunyai kemampuan untuk merubah energi mereka dari energi fosil ke energi hijau. negara-negara di dunia telah menyetujui urgensi untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh perubahan iklim dan telah melakukan kerja sama untuk usaha melakukan transisi energi menjadi energi terbarukan dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari dialog hingga kesepakatan internasional yang bertujuan untuk mendukung transisi energi ini serta membatasi penggunaan sumber daya yang sudah langka yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Data dari IEA (*International Energy Agency*) dan Bank Dunia menunjukkan bahwa masih banyak negara-negara di Afrika yang belum mampu memenuhi kebutuhan energi mereka khususnya dalam hal elektrifikasi (Ritchie. H, Dkk, 2023).

Banyak negara yang telah memasang target untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan di negara mereka. Tujuan ini didukung dengan kebijakan-kebijakan pendukung seperti insentif pajak, subsidi energi terbarukan, *feed-in tariff*, serta kerjasama-kerjasama dengan negara lain. Kerjasama dalam melakukan transisi energi sangat penting. Contohnya di benua biru, Benua Eropa sendiri, terdapat kerjasama untuk mencapai target *climate neutral energy systems*. Negara-negara di Eropa melakukan kerja sama *The European Green Deal* di bawah naungan Uni Eropa (Laktuka, Dkk., 2023). Dalam proses transisi energi,

kolaborasi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan, setiap negara memiliki keterbatasan dan keunggulan tersendiri dalam melakukan transisi energi. Contohnya adalah Paris Agreement. Paris Agreement merupakan sebuah perjanjian internasional yang diikuti oleh sebanyak 196 negara anggota UN Climate Change yang diadakan di Paris pada tahun 2015. Perjanjian ini memiliki tujuan untuk menghentikan perubahan iklim dan menahan kenaikan suhu global. Perjanjian ini menyediakan kerangka kerja untuk kerja sama dan komitmen dengan tujuan memerangi pemanasan global serta membina masa depan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Rencana ini merupakan salah satu komitmen internasional untuk menciptakan masa depan dengan energi yang berkelanjutan serta memberikan arah untuk melakukan transisi energi global.

Komunitas internasional memainkan peran kunci dalam mendukung proses transisi energi di benua Afrika melalui berbagai bentuk bantuan finansial, teknologi, dan kebijakan. Banyak negara Afrika yang memiliki potensi energi terbarukan yang besar, seperti matahari, angin, dan air, namun seringkali kekurangan modal dan teknologi yang diperlukan untuk memanfaatkan potensi ini. Oleh karena itu, dukungan dari lembaga-lembaga internasional, seperti Bank Dunia, African Development Bank (AfDB), serta berbagai inisiatif multilateral, sangat penting. Lembaga-lembaga ini menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan hidro, yang dapat membantu negara-negara Afrika mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, banyak negara maju dan organisasi internasional telah mengadakan kemitraan dengan negara-negara

Afrika untuk mentransfer teknologi energi bersih dan memberikan pelatihan teknis kepada para pekerja lokal, yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam pengelolaan proyek energi terbarukan.



Gambar 1.1: Kapasitas Energi Terbarukan Afrika

Afrika Selatan merupakan negara dengan tingkat industrialisasi terbesar di Afrika Selatan (Acheampong, 2024). Oleh karena itu, Afrika Selatan membutuhkan energi yang besar untuk mendukung aktivitas ekonomi dan industri nasional. Namun, negara ini masih sangat bergantung dengan batubara sebagai sumber utama pembangkit listrik di Afrika Selatan. Penggunaan batubara untuk menghasilkan kelistrikan di Afrika Selatan mencapai angka 80%, menjadikan Afrika Selatan sebagai negara dengan ketergantungan terhadap batubara terbesar di dunia (*International Energy Agency*, nd).

Selain masalah ketergantungan terhadap batubara, sektor energi Afrika Selatan juga menghadapi persoalan struktural, termasuk krisis kelistrikan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pembangkit listrik milik perusahaan negara, Eskom, kemudian meningkatnya frekuensi pemadaman listrik (Biznews, 2023). Krisis energi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi, aktivitas industri, dan layanan publik Afrika Selatan. Kondisi ini mendorong Afrika Selatan untuk mencari solusi jangka panjang melalui proses transisi energi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Dalam proses transisi energi tersebut, dukungan pembiayaan dan kerja sama internasional menjadi faktor penting untuk mempercepat transisi energi Afrika Selatan. Berbagai aktor internasional terlibat dalam menyediakan pendanaan, teknologi, dan Investasi dalam sektor energi bersih. Berdasarkan laporan dari *South African Climate Finance Landscape 2025*, aliran pembiayaan iklim Afrika Selatan pada periode 2022-2023, sebesar ZAR 188,3 miliar per tahun, dan hampir 40% berasal dari pendanaan internasional (Meattle et al., 2025).

Kemudian, untuk melakukan transisi energinya, sejumlah negara-negara melakukan pendekatan kepada Afrika Selatan untuk melakukan kerjasama dalam sektor energi terbarukan. Spanyol muncul sebagai aktor yang mendukung transisi energi Afrika Selatan. Pemerintah Spanyol telah berkomitmen untuk mengalokasikan dana sebesar USD 2,3 miliar untuk mendukung transisi energi dan kebutuhan infrastruktur terkait di Afrika Selatan. Kerjasama dengan Spanyol ini sangat unik karena mengintegrasikan antara transisi energi dengan pengelolaan

sumber daya air dan sanitasi. Pendanaan ini disalurkan melalui berbagai instrumen keuangan dengan melibatkan lembaga pembiayaan pembangunan seperti COFIDES (Compañía Española de Financiación del Desarrollo), sebuah lembaga pendanaan pembangunan milik Spanyol serta bekerja sama dengan institusi domestik Afrika Selatan (Sguazzin, 2023).

Struktur pendanaan Spanyol mencakup hibah sebesar EUR 15 juta untuk studi kelayakan, sementara sisanya berbentuk pinjaman dengan biaya sekitar setengah dari kredit komersial, asuransi risiko, dan investasi ekuitas. Terdapat prasyarat bahwa 30% dari pengadaan proyek harus melibatkan perusahaan Spanyol, sebuah model yang dirancang untuk memberikan keuntungan balik bagi pembayar pajak Spanyol sambil mentransfer teknologi penyimpanan baterai, hidrogen hijau, dan kendaraan listrik ke Afrika Selatan (Sguazzin, 2023).

Kemudian, Afrika Selatan juga melakukan kerjasama-kerjasama dengan China di berbagai sektor-sektor strategis termasuk di sektor energi hijau. Perlu diketahui bahwa Afrika Selatan mengikuti banyak sekali program kemitraan bersama China, contohnya seperti kelompok kerjasama ekonomi BRICS. Afrika selatan bergabung pada tanggal 24 Desember 2010. Kemudian, baru diterima menjadi anggota pada tanggal 14 April 2011 setelah Afrika Selatan mengikuti undangan China di pertemuan BRICS yang diadakan di Sanya, China. Tak hanya BRICS, Afrika Selatan juga mengikuti proyek pembangunan infrastruktur *Belt and Road Initiatives* (BRI). sebuah proyek pembangunan inisiatif China yang menghubungkan negara-negara Eurasia melalui kemitraan ekonomi,

pembangunan infrastruktur, dan perdagangan (Peter Cai, 2017). Di dalam proyek kerjasama ini, energi terbarukan merupakan salah satu fokus utama.

Dalam kemitraannya dengan China di bidang energi terbarukan atau energi hijau, China dan Afrika Selatan meningkatkan kerjasamanya pada tahun 2023. China merupakan salah satu aktor eksternal yang berperan dalam mendukung pengembangan energi terbarukan di Afrika Selatan melalui investasi dan pembangunan infrastruktur energi. *Power China* menandatangani kesepakatan untuk membangun proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Darmragt 123 megawatt bersama pengembang Irlandia, *Mainstream*. Ini adalah proyek pembangkit listrik tenaga surya darat berskala besar pertama yang dilakukan oleh perusahaan China di Afrika Selatan, dengan tujuan memasok 300 juta kilowatt-jam energi bersih ke jaringan listrik negara tersebut setiap tahunnya. Dalam Konferensi Investasi dan Kerja Sama Energi Baru Tiongkok-Afrika Selatan, Duta Besar Tiongkok untuk Afrika Selatan, Chen Xiaodong, menekankan komitmen kedua negara untuk mempercepat transisi energi dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti State Grid Corporation dan Longi Solar juga melakukan investasi dalam proyek-proyek pembangkit listrik tenaga angin, tenaga surya, penyimpanan energi, dan transmisi tenaga listrik di Afrika Selatan (Interesse, 2025).

Proyek pembangkit listrik tenaga angin De Aar di Afrika Selatan, yang dioperasikan oleh perusahaan milik negara Tiongkok, CHN Energy Longyuan Power, menjadi proyek pembangkit listrik tenaga angin pertama di Afrika yang diinvestasikan, dibangun, dan dioperasikan oleh perusahaan Cina. Proyek ini

sudah beroperasi sejak tahun 2017. Proyek ini tidak hanya mempercepat integrasi ekonomi antara Cina dan Afrika, tetapi juga menjadi contoh kerja sama China-Afrika Selatan di bidang energi terbarukan. Pada tahun 2023, proyek ini dipilih sebagai model energi hijau untuk merayakan 10 tahun BRI (CEIC, 2024). Melalui komunikasi dan promosi yang berkelanjutan, banyak perusahaan China telah mendorong kerja sama energi dengan Afrika, dengan proyek-proyek yang meningkatkan standar hidup lokal dan mendorong pembangunan hijau. Proyek-proyek kerja sama energi antara China dan Afrika telah berjalan dengan sukses, dengan total kapasitas proyek yang sedang dalam tahap perencanaan, konstruksi, atau investasi mencapai hampir 20 GW, memberikan fondasi kuat untuk kolaborasi di masa depan (CEIC, 2024).

Kemudian pada tahun 2021, Konferensi Para Pihak (*Conference of the Parties/COP*) ke-26 yang diadakan di Glasgow, Inggris, menghasilkan inisiatif Just Energy Transition Partnership (JETP), sebuah kemitraan yang bertujuan untuk mendukung transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Dalam kerangka JETP, negara-negara yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Jerman, Prancis, dan Inggris, berkolaborasi dengan Afrika Selatan untuk mempercepat dekarbonisasi sektor energinya. Afrika Selatan, sebagai negara dengan ketergantungan tinggi terhadap batu bara, menghadapi tantangan besar dalam proses transisi ini, terutama dampak sosial dan ekonomi bagi komunitas yang bergantung pada industri fosil (*European Commission*, 2021).

IPG datang dengan pendekatan yang berbeda dengan China maupun aktor eksternal lain dalam transisi energi Afrika Selatan. Hal yang menjadi pembeda dengan bantuan yang diberikan oleh aktor-aktor eksternal lain adalah IPG memberikan dukungan dengan menekankan pada keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan (Polity, 2022). IPG juga memberikan bantuan sebesar USD 12,8 miliar untuk mendukung transisi energi Afrika Selatan dalam bentuk hibah, *soft loan*, dan instrumen lainnya seperti teknologi, SDM, dll. Pendanaan dari IPG tersebut akan diarahkan untuk investasi pada sektor-sektor ekonomi hijau, Pendanaan pada *decommissioning* pembangkit listrik tenaga batu bara, Investasi dalam percepatan penyebaran energi hijau, dan pendanaan dalam mata pencaharian alternatif bagi pekerja di tambang-tambang batubara. Pendekatan yang dilakukan oleh IPG ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses transisi energi berjalan dengan adil termasuk memperhatikan dampaknya terhadap komunitas yang terdampak dalam proses transisi energi ini seperti komunitas pekerja tambang serta komunitas perempuan (*Government of UK*, 2022).

Rentang waktu yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tahun 2021 hingga 2026. Periode ini dipilih karena terdapat fase penting dalam dinamika transisi energi Afrika Selatan serta diplomasi IPG dalam mendukung transisi energi di Afrika Selatan. Pada Konferensi Para Pihak ke-26 (COP26) di Glasgow, pada tahun 2021, negara-negara anggota *International Partnership Group*, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jerman, dan Inggris bersama Afrika Selatan menghasilkan inisiatif *Just Energy Transition Partnership*. Dalam kurun waktu

tersebut keterlibatan IPG dalam mendukung transisi energi Afrika Selatan semakin intensif dengan pemberian dana sebesar USD 12,8 miliar dengan tujuan untuk membantu Afrika Selatan mengurangi ketergantungan pada batubara (*Government of UK, 2022*).

1.2. Perumusan Masalah

Bagaimana strategi diplomasi International Partners Group (IPG) dalam mendukung transisi energi Afrika Selatan melalui skema *Just Energy Transition Partnership* (JETP) selama periode 2021-2026?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran negara-negara IPG membantu Afrika Selatan dalam melakukan transisi energi
2. Mengidentifikasi perbedaan bantuan yang diberikan oleh aktor eksternal lain seperti Spanyol dan China dengan bantuan yang diberikan oleh IPG melalui JETP
3. Mengidentifikasi instrumen diplomasi IPG dalam kerangka *Just Energy Transition Partnership*

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Melalui penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan meneliti diplomasi negara-negara barat yang bermitra dengan Afrika Selatan dalam konteks transisi energi bertujuan untuk menambah literatur-literatur yang berkaitan dengan diplomasi. Penelitian ini juga dapat mengisi kesenjangan literatur akademis dalam bidang ini sekaligus

membuka peluang penelitian yang lain, mengingat penelitian mengenai diplomasi dalam transisi energi masih belum banyak.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada para akademisi untuk menjadi salah satu literatur pendukung dalam melakukan penelitian dan dapat digunakan oleh praktisi-praktisi ahli Indonesia khususnya dalam sektor energi hijau.

1.5. Kerangka Berpikir

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Kondisi dunia sekarang yang semakin memburuk akibat penggunaan energi berbahan dasar fosil yang menyebabkan fenomena-fenomena alam seperti perubahan pola cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut yang berpotensi menenggelamkan beberapa kota di dunia, dan beberapa fenomena lainnya menjadi bukti nyata dan urgensi untuk melakukan transisi energi. Penelitian-penelitian mengenai transisi energi ini sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan banyak negara-negara yang tidak mampu untuk melakukan transisi energi karena kurangnya dana, tenaga kerja, hingga resistensi untuk tetap menggunakan energi fosil. sebagian besar penelitian yang ada hanya berfokus pada penelitian transisi energi suatu negara. Oleh karena itu penelitian ini penting karena memberikan keurgensian komunitas internasional untuk mencapai target dunia yang bersih yang dimana komunitas internasional harus membantu negara Afrika Selatan dalam melakukan transisi energi untuk mencapai target tersebut.

Beberapa literatur telah membahas isu diplomasi negara barat yang melakukan kerjasama atau *partnership* dengan Afrika Selatan melalui JETP (*Just Energy Transition Partnership*). Literatur pertama yaitu jurnal berjudul “*Partnership For A Green Transition and Energy Access: Strategic Priorities for Africa and Europe*” yang disusun oleh Alex Benkenstein dan Romy Chevallier (2020). Literatur ini membahas tentang kebijakan kerjasama antara Uni Eropa dan Uni Afrika mengenai isu transisi energi. Dalam literatur ini, Uni Eropa dan Uni Afrika mempunyai mimpi yang sama untuk diwujudkan. Uni Eropa dan Uni Afrika ingin mewujudkan penggunaan energi hijau di Eropa dan di Afrika (Benkenstein & Chevallier, 2020).

Literatur kedua, jurnal yang berjudul “*South Africa's energy transition – Unraveling its political economy*” yang disusun oleh Jonathan Hanto, Akira Schroth, Lukas Krawielicki, Pao-Yu Oei dan Jesse Burton (2022). Dalam literatur ini membahas tentang kemampuan Afrika selatan dalam melakukan transisi energi, khususnya mengenai kondisi ekonomi politik Afrika Selatan dalam melakukan transisi energi ini. Dalam literatur ini juga disebutkan bahwa terdapat empat tujuan utama dalam sektor energi yaitu, ketersediaan energi, menjaga profitabilitas sektor batu bara, perlindungan lingkungan, dan pengurangan ketidaksetaraan sosial (Hanto Dkk., 2022).

Literatur ketiga, jurnal yang berjudul “*China's Quest for Global Clean Energy Leadership*” yang merupakan karya Barbara A. Finamore (2020). Dalam literatur ini membahas tentang China telah menjadi aktor utama dalam mendukung pembangunan infrastruktur energi di Afrika. Dalam laporannya,

Finamore (2020) menyoroti bahwa China berusaha menjadi pemimpin global dalam teknologi energi bersih dengan fokus pada energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Investasi besar yang dilakukan oleh China bertujuan untuk mendukung transisi energi di berbagai negara berkembang, termasuk Afrika Selatan. Namun, pendekatan China juga menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada utang dan isu transparansi dalam proyek-proyek investasi (Finamore, 2020).

Literatur keempat, jurnal yang berjudul “*The Impact of Chinese Investment on Access To Clean and Sustainable Energy in Africa*” yang merupakan karya dari Dejun Zhou, Noha Alessa, dan Vincent Konadu Tawiah (2024). Literatur ini membahas tentang hubungan antara investasi dari China terhadap akses energi bersih dan berkelanjutan di negara-negara benua Afrika. Dalam literatur ini juga terdapat bahwa China lebih tertarik untuk melakukan investasi di Afrika karena terdapat peluang perdagangan sumber daya alam sebagai timbal balik terhadap investasi untuk energi bersih (Zhou, Dkk., 2024).

Berdasarkan berbagai literatur yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa baik negara-negara barat maupun China memiliki peran signifikan dalam mendukung transisi energi Afrika Selatan. Jurnal “*Partnership For A Green Transition and Energy Access: Strategic Priorities for Africa and Europe*” oleh Benkenstein dan Chevallier (2020) menunjukkan bahwa Uni Eropa dan Uni Afrika memiliki visi bersama dalam mewujudkan penggunaan energi hijau dan mengurangi emisi karbon. Kemudian Jurnal “*South Africa's energy transition – Unraveling its political economy*” oleh Hanto et al. (2022) memberikan kontribusi penting

dengan membahas ekonomi politik Afrika selatan dalam menghadapi transisi energi. Kemudian dari perspektif China, Finamore (2020) dalam “*China’s Quest for Global Clean Energy Leadership*” menyoroti ambisi China untuk menjadi pemimpin global dalam energi bersih melalui investasi besar-besaran di negara-negara berkembang, termasuk Afrika Selatan. Hal ini diperkuat oleh Zhou, Alessa, dan Tawiah (2024) dalam jurnalnya “*The Impact of Chinese Investment on Access To Clean and Sustainable Energy in Africa*” yang menunjukkan bahwa investasi China memberikan akses energi bersih di Afrika. China tertarik berinvestasi karena terdapat peluang perdagangan dengan negara-negara mitra di Afrika.

Dari semua sumber literatur tersebut, literatur-literatur tersebut hanya membahas mengenai kerjasama-kerjasama antara Uni Eropa dan Afrika Selatan, serta membahas tentang kondisi ekonomi politik Afrika saja. Namun belum ada penelitian yang membahas mengenai kerjasama negara-negara anggota IPG (*International Partners Group*) yang didominasi oleh negara-negara barat dan pro-barat dengan Afrika Selatan melalui JETP.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan sudut pandang alternatif yang melihat bahwa kerjasama multilateral dalam kemitraan *Just Energy Transition Partnership* (JETP) antara negara-negara barat dan pro-barat seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Denmark, dan Jepang yang tergabung dalam *International Partnership Group* (IPG) dengan pemerintah Afrika Selatan merupakan cara yang paling efektif untuk mendukung transisi energi Afrika Selatan karena tidak hanya berfokus pada investasi saja, tapi juga berfokus pada keadilan sosial.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam menganalisis keterlibatan International Partners Group (IPG) dalam proses transisi energi Afrika Selatan, penting untuk merumuskan konsep-konsep yang menjadi landasan analisis dalam penelitian ini. Perumusan konsep tersebut memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menguraikan elemen-elemen kunci dari fenomena yang diteliti, khususnya terkait instrumen diplomasi yang digunakan oleh IPG, bentuk dukungan dalam kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP), serta aspek keamanan energi yang menjadi bagian dari proses transisi energi. Dengan mendefinisikan konsep secara sistematis, penelitian ini dapat menjaga konsistensi analisis serta memperjelas fokus kajian.

1.5.2.1. *Soft Power Diplomacy*

Soft power diplomacy merupakan salah satu pendekatan diplomasi yang menekankan pada nilai-nilai kebudayaan. *soft power diplomacy* menekankan pada cara-cara damai dibanding dengan *hard power diplomacy* yang menggunakan cara-cara kekerasan dan penggunaan kekuatan militer untuk melakukan diplomasi yang bukannya menyelesaikan konflik namun dapat memperburuk konflik. Diplomasi soft power adalah pendekatan yang menekankan penggunaan instrumen budaya untuk menarik perhatian dan simpati masyarakat serta negara lain guna mencapai kepentingan nasional. (Yani & Lusiana, 2018).

Diplomasi memiliki banyak jenis, salah satu jenis diplomasi adalah diplomasi *Soft Power*. Jenis diplomasi ini terdiri dari beberapa unsur yaitu, budaya, sistem nilai, dan kebijakan (Nye, 2008). Diplomasi Soft Power menurut Joseph Nye (2008), adalah kemampuan untuk dapat mempengaruhi negara lain

melalui kerja sama tanpa adanya paksaan menggunakan kekuatan militer. Pendekatan diplomasi menggunakan kekuatan militer dinilai sebagai cara yang kuno karena cara diplomasi ini bukannya menyelesaikan masalah namun malah akan memperburuk konflik yang terjadi (Nye, 2008).

1.5.2.2. Diplomasi Energi

Diplomasi energi merupakan salah satu bentuk diplomasi yang berfokus pada pengelolaan hubungan antar negara maupun aktor internasional dalam sektor energi. Diplomasi ini mencakup berbagai aktivitas seperti negosiasi hingga pembentukan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan akses terhadap sumber energi, stabilitas pasokan, serta pengembangan infrastruktur energi. Diplomasi energi menjadi semakin penting karena tidak hanya berperan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang berkaitan dengan kepentingan nasional, keamanan, dan pembangunan suatu negara (*Sustainability Directory, 2025*).

Menurut Bovan dkk. (2020), diplomasi energi dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan luar negeri yang digunakan oleh suatu negara untuk mengamankan kepentingannya melalui hubungan internasional. Diplomasi energi berfungsi sebagai instrumen untuk memengaruhi kebijakan dan tindakan aktor lain melalui mekanisme non-koersif seperti negosiasi, kerja sama ekonomi, serta pembentukan kesepakatan internasional. Dalam hal ini, diplomasi energi tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan kebijakan luar negeri dan berkaitan erat dengan aspek keamanan energi serta kepentingan ekonomi suatu negara (Bovan et al, 2020).

Lebih lanjut, diplomasi energi juga dapat dipahami sebagai proses interaksi antar aktor internasional yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dalam sektor energi melalui cara-cara damai, seperti dialog, lobi, dan kerja sama multilateral. Hal ini sejalan dengan konsep diplomasi secara umum yang didefinisikan sebagai upaya mencapai kepentingan melalui negosiasi tanpa menggunakan kekerasan (Berridge, 2010). Diplomasi energi tidak hanya dilakukan oleh negara, namun juga melibatkan aktor non-negara seperti organisasi internasional, lembaga keuangan, serta sektor swasta.

1.5.2.3. Just Energy Transition

Konsep *Just Energy Transition* merujuk pada proses transformasi sistem energi dari penggunaan energi fosil menuju energi bersih yang tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi karbon, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial, ekonomi, serta lingkungan. Dalam pengertian ini, transisi energi dipahami sebagai proses multidimensional yang tidak hanya melibatkan pendanaan dan pengembangan teknologi energi terbarukan saja, namun juga perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial masyarakat.

Istilah “*Just*” dalam *Just Energy Transition* menekankan bahwa proses transisi harus dilakukan secara adil dan inklusif, dengan memastikan bahwa kelompok masyarakat yang rentan, seperti pekerja sektor energi batubara dan komunitas yang bergantung pada industri batubara tersebut, tidak menanggung dampak negatif secara tidak proporsional. Selain itu, konsep ini juga menekankan pentingnya distribusi manfaat yang merata, sehingga hasil dari transisi energi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Tamasiga, 2024).

Memahami konsep *Just Energy Transition* memerlukan pembedahan terhadap tiga pilar utama keadilan yang menjadi pondasi dasar dalam kerangka kerja JETP, yaitu, keadilan prosedural, keadilan distributif, serta keadilan restoratif (Gverdtsiteli, 2024).

Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian risiko dan manfaat dalam proses transisi energi, khususnya dalam meminimalkan dampak negatif terhadap pekerja dan masyarakat yang bergantung pada sektor energi fosil, serta memastikan mereka memperoleh akses terhadap peluang baru di sektor energi terbarukan. Hal ini diwujudkan melalui berbagai upaya seperti pelatihan ulang tenaga kerja, pengembangan keterampilan, serta dukungan terhadap ekonomi hijau. Sementara itu, keadilan restoratif berfokus pada upaya pemberdayaan kelompok yang secara historis terpinggirkan, dengan memastikan bahwa proses transisi energi tidak memproduksi ketimpangan sosial maupun praktik yang merugikan lingkungan, melainkan mendorong perubahan struktural jangka panjang yang lebih adil dan berkelanjutan (Gverdtsiteli, 2024).

1.6. Definisi Operasional

1.6.1. Soft Power

Kemitraan JETP antara Afrika selatan dan Negara-negara IPG untuk membantu negara Afrika Selatan dalam melakukan transisi energi. Negara-negara IPG melakukan *soft power diplomacy* kepada Afrika Selatan untuk mengajak negara tersebut bermitra untuk membantu transisi energi Afrika Selatan. Melalui JETP, negara-negara mitra menggunakan soft power untuk mempromosikan

nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan energi, menarik dukungan masyarakat serta pemerintah Afrika Selatan tanpa menggunakan paksaan.

Spain muncul sebagai salah satu aktor yang melakukan *soft power diplomacy* kepada Afrika Selatan untuk mendukung transisi energinya. Spain memberikan bantuan sebesar USD 2,3 miliar untuk mendukung transisi energi dan kebutuhan infrastruktur terkait di Afrika Selatan. Kerjasama yang unik karena memadukan transisi energi dan pengelolaan air. Spain memberikan Struktur pendanaan yang mencakup hibah sebesar EUR 15 juta untuk studi kelayakan, dan sisanya berbentuk pinjaman dengan biaya sekitar setengah dari kredit komersial, asuransi risiko, dan investasi ekuitas (Sguazzin, 2023).

China sendiri telah beberapa kali melakukan *soft power diplomacy* kepada Afrika Selatan dalam bidang transisi energi ini. China telah melakukan investasi-investasi terhadap sektor energi terbarukan Afrika Selatan. *Power China* menandatangani kesepakatan untuk membangun proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Darmragt 123 megawatt bersama pengembang Irlandia, *Mainstream*. Kemudian, Proyek pembangkit listrik tenaga angin De Aar di Afrika Selatan, yang dioperasikan oleh perusahaan milik negara Tiongkok, CHN Energy Longyuan Power. Proyek ini merupakan perayaan atas kerjasama BRI selama 10 tahun (CEIC, 2024).

Disisi lain, IPG melalui *Just Energy Transition Partnership* (JETP) yang terbentuk dari konferensi para pihak ke-26 yang diadakan di Glasgow, Inggris, menawarkan bantuan alternatif yang berbeda dengan China maupun Spain. dimana kedua negara tersebut memberikan bantuan dengan cara investasi

langsung, berbeda dengan IPG yang memberikan dana sebesar USD 8,5 milyar (Polity, 2022) yang kemudian bertambah menjadi USD 12,8 miliar (*Government of UK*, 2025). Dana tersebut diberikan dalam bentuk *soft loan*, hibah, transfer teknologi, dan Sumber daya manusia. IPG memberikan bantuan ini dengan prinsip keadilan sosial dan berkelanjutan (*Government of UK*, 2022).

1.6.2. Diplomasi Energi

Diplomasi energi dipahami sebagai aktivitas diplomatik yang dilakukan untuk mengamankan kepentingan energi, memperluas kerjasama, serta mempengaruhi kebijakan energi melalui negosiasi, kerja sama internasional, dan penggunaan instrumen non militer (Bovan et al., 2020). Dalam penelitian ini, konsep diplomasi energi dioperasionalkan ke dalam indikator yang mempresentasikan instrumen yang digunakan oleh aktor untuk mempengaruhi sektor energi di negara lain. Oleh karena itu, ada tiga instrumen utama yang digunakan oleh International Partners Group (IPG) untuk mendukung transisi energi Afrika Selatan. melalui skema *Just Energy Transition Partnership* (JETP).

Pertama, Diplomasi finansial, merujuk pada penggunaan instrumen pembiayaan dari IPG sebagai alat diplomasi untuk mencapai tujuan transisi energi Afrika Selatan. Komitmen pendanaan dari negara-negara IPG mencerminkan praktik diplomasi energi melalui mobilisasi sumber daya finansial untuk mempengaruhi arah pembangunan energi Afrika Selatan (Transnational Institute, 2023).

Kedua, Diplomasi Institusional, merujuk pada penggunaan kerangka kelembagaan, regulasi, serta mekanisme tata kelola sebagai instrumen diplomasi energi. Indikator ini mencakup dukungan terhadap reformasi kebijakan energi, pembentukan pasar energi, serta penguatan kapasitas institusi dalam sektor energi. Dalam JETP, keterlibatan IPG dalam membentuk kerangka kerja kebijakan dan koordinasi implementasi menunjukkan bahwa diplomasi energi juga dijalankan melalui institusi dan mekanisme tata kelola internasional (Jain & Bustami, 2025)

Ketiga, diplomasi normatif, merujuk pada upaya aktor dalam menyebarkan nilai, prinsip, dan standar tertentu dalam pengelolaan energi. Indikator ini mencakup promosi konsep just energy transition, standar lingkungan dan sosial, serta prinsip keberlanjutan dalam kebijakan energi. Dalam JETP, IPG mendorong penerapan prinsip transisi energi yang adil sebagai bagian dari praktik diplomasi energi, yang tidak hanya berfokus pada dekarbonisasi tetapi juga pada aspek keadilan sosial yang memperhatikan kesejahteraan pekerja, komunitas terdampak, serta tata kelola yang inklusif sebagai dimensi utama keberhasilan transisi energi Afrika Selatan (Ukama, 2025).

1.6.3. *Just Energy Transition*

Pendekatan IPG untuk mendukung transisi energi Afrika Selatan berbeda dengan pendekatan negara-negara lain. IPG menawarkan kerangka kerjasama yang tidak hanya berfokus pada pendanaan untuk *decommissioning* pembangkit listrik tenaga batubara dan tambang batubara, namun juga mementingkan prinsip keadilan sosial yang memperhatikan hak-hak bagi pekerja yang terdampak dari *decommissioning* tersebut (Polity, 2022).

Dalam kerangka *Just Energy Transition Partnership* (JETP) terdapat tiga pilar utama keadilan (Gverdtsiteli, 2024). Pertama, keadilan distributif, yaitu sejauh mana transisi energi ini didistribusikan secara adil yang mencakup perlindungan terhadap kelompok pekerja sektor batubara dan masyarakat di wilayah yang terdampak *decommissioning*. Hal ini dikarenakan transisi energi berpotensi menimbulkan ketimpangan baru apabila manfaatnya tidak terdistribusi secara merata (Tamasiga, 2024).

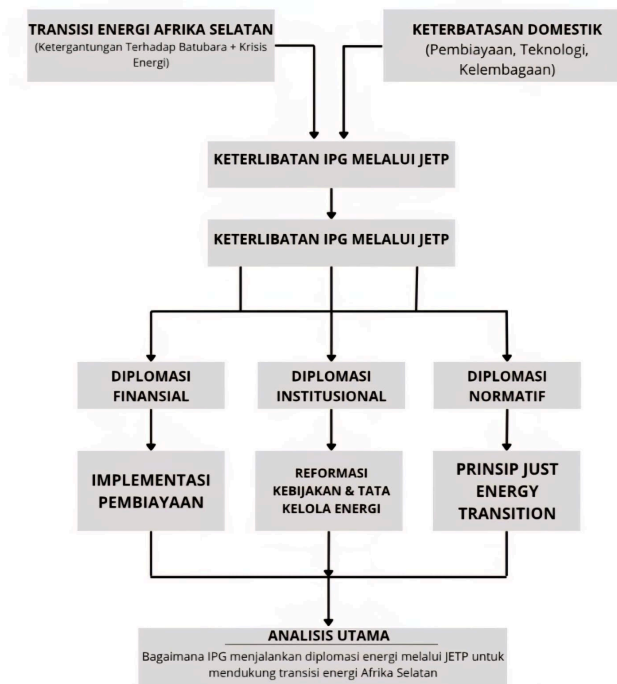
Kedua, keadilan prosedural, yaitu sejauh mana proses pengambilan keputusan dalam kebijakan transisi energi dilakukan secara inklusif dan transparan. Keterlibatan *Presidential Climate commission* yang menginisiasikan studi, dialog antara *stakeholders*, hingga konferensi-konferensi yang mengarah pada pengembangan kerangka kerja akhir, yang diadopsi pada Agustus 2022 (Gverdtsiteli, 2024).

Ketiga, keadilan restoratif. merujuk pada upaya untuk memperbaiki ketimpangan historis yang dihasilkan oleh sistem energi berbasis fosil. Indikator ini mencakup program pelatihan ulang (*reskilling*) bagi para pekerja yang terdampak dari penghentian operasional tambang maupun pembangkit listrik bertenaga batubara, penciptaan lapangan kerja baru, serta pembangunan ekonomi lokal di wilayah terdampak. Dimensi ini menekankan bahwa transisi energi tidak berorientasi pada dekarbonisasi, tetapi juga pada upaya memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang terdampak dari dekarbonisasi tersebut (UNRISD, 2025).

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, konsep *Just Energy Transition* digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai bagaimana prinsip keadilan diintegrasikan dalam proses transisi energi.

1.6.4. Kerangka Berpikir

Secara sistematis, kerangka pemikiran penelitian seperti berikut.



Gambar 1.2: Kerangka Pemikiran

1.7. Argumen Penelitian

Keterlibatan International Partners Group melalui JETP merupakan bentuk diplomasi energi multilateral yang bertujuan mempercepat transisi energi Afrika Selatan melalui dukungan finansial, kelembagaan, dan normatif yang paling efektif karena tidak hanya berfokus pada *decommissioning* pembangkit listrik tenaga batubara dan investasi infrastruktur energi terbarukan saja, namun juga berfokus pada nilai keadilan sosial dengan memperhatikan hak-hak pekerja yang

terdampak dari penghentian operasional pembangkit listrik tenaga batu bara tersebut.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan deskriptif. Metode ini dipilih karena metode ini cocok untuk menjawab pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat memahami fenomena-fenomena yang diangkat oleh peneliti. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat untuk mengkaji situasi ilmiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dan analisis dalam metode ini berfokus pada aspek kualitatif, dengan penekanan lebih pada pemahaman makna (Sugiyono, 2018:213). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Pendekatan ini lebih sesuai untuk meneliti aspek-aspek terkait perilaku, sikap, motivasi, persepsi, dan tindakan subjek. Dengan kata lain, metode ini tidak dapat digantikan oleh pendekatan kuantitatif (Moleong, 2007:6).

Penelitian ini berfokus kepada IPG yang merupakan kelompok kemitraan yang terdiri dari negara barat dan pro-barat dalam menjalin kerjasama strategis dengan Afrika Selatan dengan membentuk sebuah kemitraan *Just Energy Transition Partnership* (JETP) untuk membantu Afrika Selatan melakukan transisi energi hijau. IPG datang dengan pendekatan yang berbeda, yaitu transisi energi yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan (Polity, 2022).

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang. Meskipun demikian, sifat penelitian ini adalah non-lapangan, sehingga tidak memerlukan kegiatan observasi langsung di lapangan. Seluruh data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen resmi dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan fokus penelitian yaitu bantuan IPG untuk mendukung transisi energi Afrika Selatan.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah International Partners Group (IPG) yang melakukan diplomasi energi untuk bekerjasama dengan Afrika Selatan untuk membuat kerangka kerjasama energi yaitu *Just Energy Transition Partnership* (JETP).

1.8.4. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen resmi pemerintah Afrika Selatan, laporan tahunan JETP, serta jurnal-jurnal yang membahas mengenai transisi energi, *soft power diplomacy*, dan kondisi geopolitik.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder yang diperoleh melalui literatur-literatur seperti buku dan artikel jurnal sebagai pelengkap, dokumen resmi pemerintah Afrika Selatan, serta laporan tahunan JETP dalam hal transisi energi.

1.8.6. Teknik pengumpulan data

Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui berbagai sumber yang relevan dan kredibel guna mendukung analisis yang komprehensif. Sumber data tersebut meliputi buku-buku akademik, dokumen resmi pemerintah, laporan tahunan dan laporan kebijakan terkait Just Energy Transition Partnership (JETP), serta publikasi dari lembaga internasional dan organisasi terkait. Selain itu, data juga diperoleh dari artikel jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer-review, serta berbagai situs resmi dan artikel daring yang memiliki kredibilitas dan relevansi dengan topik penelitian. Pemilihan sumber data dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan validitas, reliabilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian mengenai diplomasi energi yang dilakukan oleh International Partners Group (IPG) dalam mendukung transisi energi Afrika Selatan.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Peneliti menggunakan teknik reduksi data sebagai langkah awal dalam proses analisis data. Reduksi data dilakukan dengan menentukan dan menyaring informasi yang relevan secara sistematis, dengan tujuan untuk memfokuskan pada aspek-aspek penting dari diplomasi IPG dalam kerangka kerjasama transisi energi melalui skema *Just Energy Transition Partnership* (JETP) dengan Afrika Selatan. Proses reduksi data ini mengidentifikasi data yang berkaitan dengan strategi diplomasi IPG, termasuk motif politik, ekonomi dan lingkungan. Fokus utama diarahkan bagaimana diplomasi energi yang dilakukan oleh IPG adalah yang paling efektif untuk Afrika Selatan dalam melakukan transisi energinya karena tidak hanya berfokus isu lingkungan tetapi juga mementingkan isu keadilan sosial.

Oleh karena itu, reduksi data dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas dinamika hubungan IPG dengan Afrika Selatan dalam melakukan transisi energinya.

1.8.8. Kualitas data

Untuk menjaga kualitas data dalam penelitian ini, peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh memenuhi prinsip validitas dan reliabilitas. Validitas data dibuktikan dengan memastikan bahwa data berasal dari sumber yang terpercaya, seperti dokumen-dokumen resmi pemerintah Afrika Selatan, laporan tahunan JETP, serta publikasi dari IEA, *World Bank*, dan lembaga lainnya.

Selain itu, reliabilitas data dibuktikan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda dengan tujuan untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian data. Data yang dikumpulkan memiliki relevansi dengan fokus penelitian yaitu diplomasi energi IPG untuk mendukung transisi energi Afrika Selatan dalam kerangka kerjasama JETP.